

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi riil yang ditandai oleh banyaknya barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi akan diarahkan pada usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan pendapatan nasional, sekaligus diarahkan pada pemerataan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah.

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi meliputi: (1) Peran Alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi; (2) Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar; (3) Peran stabilisatif, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *disequilibrium*, dan (4) Peran dinamisatif, yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju. (Dumairy, 1997: 158)

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu bentuk peran distribusi pemerintah bertujuan menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain adalah tingginya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, rendahnya kualitas produktivitas tenaga kerja dan belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja di luar negeri.

Berkaitan dengan beberapa persoalan tersebut maka kebijakan pembangunan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada pengembangan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat. Di samping itu, peningkatan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah eksploitasi tenaga kerja.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka pembangunan ketenagakerjaan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas pembangunan yang perlu segera dilaksanakan oleh setiap daerah. Hal ini penting mengingat pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, membutuhkan SDM yang semakin berkualitas dalam melakukan pendayagunaan dan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang tersedia. Termasuk yang saat ini sedang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung selama tahun 2003--2007 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2003--2007

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perubahan (persen)
2003	781.053	-
2004	800.490	2,49
2005	809.860	1,17
2006	819.016	1,13
2007	827.058	0,98
Rata-Rata		1,44

Sumber: Badan Pusat Statatik Provinsi Lampung, 2008

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung selama tahun 2003-2007 mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,44 persen per tahun dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebesar 827.058 jiwa. Jumlah ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Menurut Sadono Sukirno (1985: 2002). jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang sangat mendukung pembangunan, tetapi hal ini harus diiringi dengan kualitas sumber daya manusia. Pertambahan jumlah penduduk dapat dikatakan sebagai faktor pendorong dalam pembangunan ekonomi apabila hal ini diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, akan tetapi disisi lain pertambahan penduduk dapat dikatakan sebagai penghambat apabila tidak disertai oleh adanya perluasan kesempatan kerja. Gambaran perkembangan angkatan kerja dan penyerapannya di Kota Bandar Lampung selama tahun 2003--2007 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Tahun 2003--2007

Tahun	Angkatan Kerja (orang)	Angkatan Kerja Terserap (orang)	Angkatan Kerja Tidak Terserap (orang)	Perubahan (persen)
2003	374.051	336.174	37.877	-
2004	391.247	347.753	43.494	3,44
2005	409.732	363.544	46.188	4,54
2006	428.044	374.096	53.948	2,90
2007	446.136	387.053	59.083	3,46
Rata-Rata				3,59

Sumber: Badan Pusat Statatik Provinsi Lampung, 2008

Tabel 2 memperlihatkan bahwa selama tahun 2003--2007 angkatan kerja mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan angkatan kerja yang tidak terserap dengan rata-rata 3,59 persen per tahun. Kondisi ini perlu segera diatasi mengingat meningkatnya tingkat pengangguran bila tidak diimbangi dengan upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja akan semakin memperbesar laju urbanisasi.

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung, selain sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, juga sebagai pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung sehingga memiliki potensi besar untuk dijadikan sasaran urbanisasi para pencari kerja, terutama yang datang dari daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandarlampung, yaitu:

- Utara : Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
- Selatan : Kecamatan Padangcermin, Ketibung Lampung Selatan
- Timur : Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Lampung Selatan
- Barat : Kecamatan Gedongtataan dan Padangcermin Kabupaten Pesawaran

Mengingat pentingnya menekan laju urbanisasi maka kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung perlu diarahkan pada pengembangan wilayah yang mendorong peningkatan peran antardaerah agar mampu menampung dan mengarahkan arus urbanisasi dengan usaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja di suatu wilayah. Hal ini dilakukan melalui spesialisasi sektor ekonomi yang merupakan sektor basis serta kemampuannya dalam menciptakan pelipatgandaan tenaga kerja pada sektor nonbasis berdasarkan potensi ekonomi yang ada di wilayahnya.

Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 92,96 km² memiliki beragam potensi yang tersebar di 13 kecamatan yaitu Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Timur, Telukbetung Utara, Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Sukarame, Sukabumi, Kemiling, Rajabasa, Kedaton, Panjang, dan Tanjungsenang. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan perwilayahan bidang ketenagakerjaan adalah ketersediaan tenaga kerja yang telah terserap di berbagai lapangan usaha di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Gambaran jumlah tenaga kerja yang terserap di Kota Bandar Lampung berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa dari 387.053 orang total tenaga kerja yang terserap di 13 kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung pada tahun 2007, Kecamatan Panjang memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi sebesar 12,05 persen, diikuti Kecamatan Telukbetung Selatan sebesar 10,55 persen, kemudian Kecamatan Tanjungkarang Pusat sebesar 10,52 persen, sedangkan Kecamatan Kemiling berada di posisi keempat sebesar 10,51 persen.

Tabel 3. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Proporsi (persen)
1	Tanjung Karang Pusat	40.731	10,52
2	Tanjung Karang Barat	25.817	6,67
3	Tanjung Karang Timur	28.002	7,23
4	Teluk Betung Utara	31.864	8,23
5	Teluk Betung Selatan	40.824	10,55
6	Teluk Betung Barat	24.693	6,38
7	Sukarame	26.199	6,77
8	Sukabumi	17.766	4,59
9	Kemiling	40.680	10,51
10	Rajabasa	14.799	3,82
11	Kedaton	39.185	10,12
12	Panjang	46.637	12,05
13	Tanjung Senang	9.856	2,55
Total		387.053	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, 2008

Kecamatan Kemiling merupakan salah satu kecamatan yang diharapkan dapat berperan penting dalam menekan laju urbanisasi dari wilayah lain ke Kota Bandar Lampung adalah Kecamatan Kemiling, mengingat posisinya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Gedongtatan Kabupaten Pesawaran. Gambaran potensi ekonomi Kecamatan Kemiling berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Potensi Ekonomi Kecamatan Kemiling Berdasarkan Lapangan Usaha pada Tahun 2007

No	Lapangan Usaha	Nilai (Rp000,00)	Proporsi (%)
1	Pertanian	74.846,17	30,53
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00
3	Industri	15.874,78	6,48
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.800,17	1,14
5	Bangunan	30.849,42	12,58
6	Perdagangan, Restoran dan Perhotelan	20.753,61	8,47
7	Pengangkutan dan Komunikasi	49.474,37	20,18
8	Keuangan, Persewaan Bangunan, dan Jasa Perusahaan	19.352,94	7,89
9	Jasa-jasa	31.195,86	12,73
Total		245.147,32	100,00

Sumber: Monografi Kecamatan Kemiling, 2008

Tabel 4 memperlihatkan bahwa dari 9 sektor lapangan usaha yang ada di Kecamatan Kemiling, sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar sebanyak 30,53 persen, diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi 20,18 persen, sektor jasa-jasa 12,73 persen, sektor bangunan 12,58 persen, sektor perdagangan, restoran, dan perhotelan 8,47 persen, sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan 7,89 persen, sektor industri 6,48 persen, sektor listrik gas dan air bersih 1,14 persen, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian tidak ada. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi ekonomi di Kecamatan Kemiling belum merata pada seluruh sektor lapangan usaha, namun masih didominasi oleh beberapa sektor saja seperti sektor pertanian, pengangkutan dan komunikasi, bangunan, dan jasa-jasa. Oleh karena itu diharapkan di masa mendatang, adanya suatu kebijakan pemerintah yang mampu meningkatkan partisipasi seluruh sektor secara seimbang.

Sesuai dengan tujuan pembangunan perwilayahan, yaitu mampu mengembangkan daerah-daerah lain sebagai daerah pendukung, maka kecamatan kemiling dan daerah sekitarnya diharapkan dapat meningkatkan daya serap terhadap tenaga kerja dengan mengembangkan sektor ekonomi yang merupakan sektor basis. Sehubungan dengan hal tersebut maka usaha pengembangan sektor-sektor ekonomi di kecamatan kemiling tidak terlepas dari kecamatan sekitarnya, yaitu Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Barat, Telukbetung Utara, Telukbetung Selatan, Telukbetug Barat, Panjang, Sukarame, Kedaton, Rajabasa, Sukabumi dan Tanjungsene ng sebagai pembanding.

B. Permasalahan

Tingginya pertumbuhan penduduk akan memacu pertumbuhan angkatan kerja, jika hal ini tidak diimbangi dengan usaha perluasan kesempatan kerja, maka kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung akan cenderung berurbanisasi ke pusat kota. Sesuai dengan tujuan pengembangan potensi Kecamatan Kemiling agar memberikan arah dalam pembangunan sehingga akan lebih menguntungkan bagi daerahnya. Dari uraian di atas dapat diambil suatu permasalahan yaitu: “Sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor basis dan sektor nonbasis, serta berapa besar pelipatgandaan tenaga kerja yang diakibatkan oleh pengembangan sektor basis yang akan menambah kesempatan kerja di sektor nonbasis”.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis dalam wilayah kecamatan Kemiling dan daerah sekitarnya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pelipatgandaan tenaga kerja pada sektor nonbasis, sebagai akibat dari pengembangan sektor basis.

D. Kerangka Pemikiran

Masalah penduduk adalah masalah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat besar sekali di negara-negara berkembang. Hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah dalam usaha-usaha pembangunan, karena di satu pihak pertambahan penduduk yang sangat pesat akan menimbulkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang hampir sama cepatnya, akan tetapi di lain pihak negara-negara tersebut memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk menciptakan kesempatan kerja

baru. Sebagai akibat dari kedua keadaan yang bertentangan tersebut, maka penambahan jumlah penduduk akan menimbulkan berbagai masalah yaitu, sebagai berikut:

- a. Jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah banyak.
- b. Perpindahan penduduk dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota menjadi bertambah pesat dan menimbulkan masalah urbanisasi yang berlebihan.

Sementara itu tingginya pertumbuhan penduduk secara otomatis akan menambah jumlah angkatan kerja. Kebanyakan masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan kemampuan untuk memperluas lapangan kerja. Salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja adalah melalui pengembangan sektor usaha yang bersifat padat karya (*labour intensive*) yang secara relatif dapat menyerap tenaga kerja dalam proses produksinya.

Analisa ekonomi regional terhadap suatu daerah mencakup analisa mengenai faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, peranan berbagai sektor ekonomi dan kendala yang dihadapi dalam perekonomian daerah maupun strategi yang perlu diambil dalam kebijaksanaan pengembangan wilayah. Dengan ditentukannya sektor basis ekonomi diharapkan dapat mempengaruhi *output* sektor nonbasis, yang pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan perekonomian daerah yang bersangkutan. (Iwan Jaya Aziz. 1994: 229).

Berdasarkan analisis lokasi, pada pendekatan komparatif terdapat beberapa perangkat analisis lokasi bagi perekonomian regional, salah satunya adalah *Location Quotient*. Parameter ini pada dasarnya adalah membandingkan sub unit

suatu wilayah terhadap wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya LQ dapat digunakan pada tingkat sektoral, dengan demikian besarnya nilai koefisien LQ menunjukkan potensi sektoral di sub unit wilayah tersebut. Besaran nilai LQ berkisar antara $LQ > 1$ sampai dengan $LQ < 1$. (Budi Permono, 1990: 9).

Dasar pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi wilayah adalah spesialisasi sektor ekonomi yang merupakan sektor basis dalam lingkup pembangunan.

Peranan masing masing sektor dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sektor basis ekonomi yang merupakan sektor yang dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa untuk daerahnya sendiri maupun luar daerah dan sektor ini memiliki peluang untuk berkembang, dimana sektor basis dapat membantu sektor nonbasis dalam meningkatkan nilai tambah. Sedangkan sektor nonbasis adalah sektor yang hanya dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa untuk daerahnya sendiri dan apabila terdapat kekurangan akan terpenuhi dari daerah lain.

Untuk menganalisa kemampuan sektor ekonomi terhadap penerapan tenaga kerja di kecamatan Kemiling, dengan harapan sektor-sektor ekonomi yang ada di kecamatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja semaksimal mungkin, maka cara yang paling tepat untuk itu adalah dengan memprioritaskan sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor basis. Pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi wilayah didasarkan pada spesialisasi sektor ekonomi yang merupakan sektor basis dalam lingkup daerah. Selain itu, biasanya pelipatgandaan tenaga kerja yang tersedia di sektor nonbasis ekonomi adalah sebagai akibat adanya sektor basis ekonomi yang dimiliki. Untuk itu, diperlukan suatu analisis tentang sumber daya dan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk didayakan.